



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)  
**UNIT KERJA** : BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : PRABOWO FARID TRIJOKO
2. Jabatan : KEPALA SUBAUDITORAT
3. NHK : 204001

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.592.600.625

1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m<sup>2</sup>/54 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 685.000.000
2. Tanah Seluas 135 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 167 m<sup>2</sup>/70 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA PONOROGO, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2335 m<sup>2</sup>/200 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 82.600.625

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 199.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SCORPIO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA 125 PGMFI Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
4. MOBIL, MAZDA BIANTE Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 25.000.000

**D. SURAT BERTHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 252.598.675

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. 60.000.000

**Sub Total**

Rp. 2.129.699.300



III. HUTANG

Rp. 411.687.651

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.718.011.649

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.